

KOLABORASI PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Dhita Marlinda Dwi Heryati
NPP. 32.0365

Asdaf Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0365@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP). The background of this research arises from the growing social issues in major urban areas, including the increasing presence of homeless individuals and beggars, which impacts public order, social comfort, and the city's image as a tourism destination.

Purpose: The study aims to describe the form of collaboration between the two institutions, identify supporting and inhibiting factors, and analyze efforts made to overcome challenges in the implementation of guidance programs for the homeless and beggars. **Method:** The research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants from the Social Service, Satpol PP, and community representatives. **Result:** The findings show that collaboration is manifested through joint enforcement operations, field outreach, social rehabilitation, and skills training programs. However, the collaboration still faces obstacles such as limited infrastructure, lack of technical coordination, and incomplete data system. **Conclusion:** The conclusion of this study is that inter-institutional collaboration in fostering beggars in Bandung City has a strong framework but has not been running optimally. Strengthening institutional aspects, collaborative leadership, and active community involvement are the keys to realizing sustainable beggar management that is oriented towards social empowerment.

Keywords: Collaboration, Civil Service Police Unit, Social Service, Homeless, Beggars, Bandung City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berangkat dari permasalahan sosial yang terus berkembang di kota besar seperti Bandung, termasuk meningkatnya jumlah gepeng yang berdampak pada ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, dan citra kota sebagai destinasi wisata. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi kedua instansi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menelusuri upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan gepeng. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan kunci di lingkungan Dinas Sosial, Satpol PP, serta tokoh Masyarakat. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjalin dalam

bentuk kegiatan penertiban bersama, penjangkauan, rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi hambatan seperti kurangnya koordinasi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pendataan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antarlembaga dalam pembinaan gepeng di Kota Bandung memiliki kerangka yang kuat namun belum berjalan optimal. Penguatan aspek kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan penanganan gepeng yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. **Kata Kunci :** Kolaborasi, Satpol PP, Dinas Sosial, Gelandangan, Pengemis, Kota Bandung.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis semakin marak terjadi dan tentu berdampak langsung terhadap ketertiban umum di berbagai ruang publik. Selain itu, gelandangan dan pengemis semakin sering melakukan kriminalisasi di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya keduanya merupakan akibat dari kemiskinan struktural dan pengangguran (Parsell et al., 2022). Aktivitas mereka yang seringkali berada di jalan-jalan protokol, lampu merah, pusat perbelanjaan, hingga kawasan wisata sering kali menimbulkan gangguan, baik bagi arus lalu lintas maupun bagi kenyamanan masyarakat. Permusuhan masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis sering kali berasal dari kesalahpahaman dan penilaian moral, yang memengaruhi kebijakan yang bersifat menghukum daripada memberikan dukungan yang penuh empati. (Fitzpatrick, Watts, & Bramley, 2022). Apabila dibiarkan terus-menerus, kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat merusak citra daerah dan menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan layak huni. (Hasibuan & Pane, 2019)

Gelandangan dan pengemis yang berada di ruang publik mencerminkan adanya permasalahan sosial yang serius dan menjadi indikator bahwa pembangunan di suatu negara belum berjalan secara merata. Selain itu, mengemis juga harus dipahami bukan hanya sebagai tanda kemiskinan, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup di tengah ketiadaan dukungan dari lembaga-lembaga sosial. (Crossley, 2021). Dalam konteks pembangunan nasional, idealnya setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan dalam bentuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Namun, munculnya gelandangan dan pengemis justru menandakan masih adanya ketimpangan sosial. Selain itu, keberadaan gelandangan dan pengemis juga menunjukkan bahwa upaya pembangunan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Rahmatullah et al., 2024)

Menurut data dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial, dalam lima tahun terakhir Kementerian Sosial telah merekap total dari gelandangan dan pengemis yang terus meningkat. Pada tahun 2023 Kementerian Sosial RI memperkirakan jumlah pengamen, pengemis, dan tunawisma di kawasan Indonesia sebesar 77.500 manusia, dimana terbagi dalam berbagai kota, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya (Fadri, 2023)

Mengerucut pada persoalan gelandangan dan pengemis, merujuk data tahun 2023 dari Dinas Sosial, di Provinsi Jawa Barat terdapat 12.676 orang yang terdiri dari pengamen, pengemis, serta tunawisma. Kota Bandung menduduki peringkat teratas di tingkat kota dengan jumlah 263 gelandangan maupun pengemis yang terekap oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi dari Dinas Sosial Kota Bandung yang diberitakan oleh media elektronik, terdapat 2.800 Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di jalanan Kota Bandung.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menangani permasalahan gelandangan dan pengemis melalui pendekatan yang lebih bijak, humanis, dan berkelanjutan. Dimulai dari rumah singgah, para gelandangan dan pengemis menjalani proses pemulihan fungsi sosial melalui bimbingan dasar. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti adanya gepeng yang melarikan diri, upaya peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan di rumah singgah terus dilakukan. (Kompasiana, 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan isu sosial yang terus berkembang, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada peran masing-masing lembaga secara sektoral, tanpa mengelaborasi bagaimana bentuk kerja sama atau kolaborasi yang dijalankan antarlembaga dalam penanganan masalah ini secara terpadu.

Selain itu, masih minim penelitian yang menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* sebagai landasan teoritik untuk menganalisis hubungan antarlembaga pemerintahan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Padahal, pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam melihat dinamika hubungan kerja sama lintas sektor, termasuk aspek partisipasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses komunikasi antar aktor. Kurangnya penerapan pendekatan ini menyebabkan terbatasnya pemahaman terhadap kompleksitas kolaborasi dalam konteks penyelesaian masalah sosial yang multidimensional.

Lebih lanjut, dalam konteks lokal, Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup tinggi di Jawa Barat, termasuk gelandangan dan pengemis. Namun, kajian akademik yang secara spesifik meneliti kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial di Kota Bandung dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok ini masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik sosial perkotaan Bandung yang dinamis dan beragam memerlukan penanganan kolaboratif yang adaptif dan berbasis konteks lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tujuan menggambarkan secara rinci bentuk kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bandung, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang diterapkan untuk memperkuat efektivitas kerja sama dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Dengan pendekatan kualitatif dan kerangka *Collaborative Governance*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model kolaborasi antarlembaga dalam konteks kebijakan sosial di tingkat daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulisan pertama yang dilakukan oleh Syahna Leidia Darma perbedaannya yaitu pada penulisan tersebut penulisan yang dilakukan berupa penertiban (Novella et al., 2021) sedangkan pada penulisan ini berfokus pada kolaborasi, sedangkan untuk pendekatan riset keduanya menerapkan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kedua dijalankan Susi, Muhammad Abas, dan Anwar Hidayat perbedaannya yaitu pembahasan yang diangkat berfokus pada implementasi dan peran Satpol PP dalam penertiban (Susi et al., 2024). Sedangkan pada penulisan ini berfokus pada peran Satpol PP dengan Peran Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis. Namun sama – sama menelusuri faktor penghambat. Penulisan ketiga yang diteliti oleh Yuyun Mulyati, Muhammad

Ridwan Caesar, Ellia Purnama pembahasan yang diangkat mengenai analisis manajemen strategis penanggulangan kemiskinan (Mulyati et al., 2022) sedangkan penulisan ini berfokus pada kolaborasi antar 2 (dua) dinas dalam memberdayakan. Namun, kedua penulisan ini memiliki persamaan sama – sama meneliti di Kota Bandung. Penulisan keempat yang diteliti oleh F. Ayu Hardiyanti dimana pendekatan riset keduanya menerapkan metode kualitatif deskriptif (Adolph, 2016) Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada teori dan lokasi penulisannya. Teori yang digunakan Penulisan F. Ayu Hardiyanti menggunakan Teori Ratner, sedangkan pada riset ini mengaplikasikan Teori Ansell dan Gash. Penulisan kelima yang diteliti oleh Muthi Janatun, dan Rudiana memiliki persamaan lokasi di Kota Bandung sedangkan perbedaannya pada metode dan fokus pembahasan dimana penulisan pertama membahas tentang pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kota Bandung (Mulyati et al., 2022) sedangkan penulisan ini membahas spesifik instansi yang berada dibawah pemerintah daerah Kota Bandung untuk melakukan pembinaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah yang berfokus pada kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Meskipun isu gelandangan dan pengemis telah menjadi objek kajian dalam sejumlah penelitian sebelumnya, studi ini menampilkan pendekatan, fokus, dan kontribusi ilmiah yang berbeda dan lebih mendalam.

Salah satu aspek pembaruan yang diusung oleh penelitian ini adalah pendekatan kolaboratif antar lembaga secara komprehensif. Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya hanya membahas peran tunggal suatu lembaga, penelitian ini secara eksplisit mengkaji bentuk sinergi antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Kolaborasi ini tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaan semata, tetapi juga mencakup tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kerja sama dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Selanjutnya, penelitian ini memperkuat landasan teoritisnya dengan menggunakan kerangka teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini mencakup empat elemen utama: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Pendekatan teoritis ini masih jarang diadopsi dalam kajian sejenis, sehingga penggunaannya dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik, khususnya dalam analisis kebijakan sosial dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dari segi konteks, studi ini mengambil lokasi di Kota Bandung, sebuah wilayah urban yang memiliki kompleksitas sosial serta dinamika perkotaan yang khas. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi serupa yang mengambil tempat di wilayah dengan karakteristik berbeda, seperti Kabupaten Nganjuk, Karawang, atau Medan. Dengan menitikberatkan pada konteks perkotaan Bandung, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual yang lebih relevan terhadap pemahaman dan penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan kota besar.

Aspek kebaruan lainnya terletak pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kolaborasi. Penelitian ini secara mendalam mengkaji berbagai tantangan teknis, hambatan koordinatif, serta respons masyarakat yang memengaruhi efektivitas kerja sama antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kolaborasi di tingkat pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, dengan mengangkat keempat aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Khususnya, dalam

merumuskan model kolaborasi antarlembaga pemerintah daerah yang mampu menjawab persoalan sosial secara lebih terintegrasi, humanis, dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembinaan yang bersifat berkelanjutan dan humanis..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode induktif untuk memahami proses kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan kunci dari kedua instansi serta tokoh masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang utuh tentang dinamika kolaborasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Tim Penjangkauan, aparatur dinas social, tokoh Masyarakat, kepala satuan polisi pamong praja, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kepala seksi pengendalian dan operasional, dan aparatur sosial pamong praja. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan 9 orang informan tersebut. Adapun teori yang digunakan menggunakan Teori Ansell and Gash yang memiliki 4 dimensi diantaranya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan kota besar dengan dinamika sosial tinggi, termasuk keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di area publik strategis. Lokasi fokus kolaborasi berada di beberapa titik rawan PMKS seperti Dago, Pasteur, Pasirkoja, Ahmad Yani, dan Gatot Subroto.

Penelitian ini menganalisis kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pembinaan gepeng menggunakan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

3.1 Kondisi Awal Kolaborasi

Permasalahan meningkatnya jumlah gepeng di Kota Bandung mendorong inisiasi kerja sama antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Keduanya, baik Satpol PP maupun Dinas Sosial memiliki tugas dan peran masing – masing untuk menuju kepentingan ersama. Kepentingan bersama atas ketertiban umum dan tanggung jawab sosial menjadi pemicu terbentuknya kolaborasi. “Kolaborasi ini penting karena tidak bisa hanya ditertibkan, tetapi harus dibina agar tidak kembali ke jalan.” (Informan dari Satpol PP)

3.2 Desain Kelembagaan

Sudah terdapat SOP kerja sama serta kegiatan terpadu seperti operasi razia dan rehabilitasi. Namun, belum ada integrasi sistem informasi dan kelembagaan yang mapan, sehingga proses pembinaan masih bersifat teknis.

Tabel 3.1 Desain Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP

Aspek	Keterangan
SOP Penertiban	Ada, namun bersifat sectoral
Data PMKS	Belum terintegrasi
Rumah Singgah	Tersedia namun daya tampung terbatas
Peraturan	Mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2019 dan PP Nomor 31 Tahun 1980

Sumber: Hasil Penelitian penulis 2025

3.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan kolaboratif belum terbentuk secara optimal. Masing-masing institusi masih menjalankan tugasnya secara terpisah. Belum ada penanggung jawab tunggal untuk integrasi kebijakan dan tindakan lapangan. “Kadang waktu penertiban tidak selaras dengan kesiapan rehabilitasi...jadi bolak-balik saja.” (Informan dari Dinas Sosial)

3.4 Proses kolaboratif antara

Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandung berlangsung melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Kolaborasi ini dimulai dari kegiatan penertiban bersama di lapangan, di mana Satpol PP dan Dinsos bekerja secara terpadu untuk menjaring gepeng dari berbagai titik strategis kota. Setelah penertiban, dilakukan proses asesmen awal untuk mengidentifikasi latar belakang, kondisi sosial, serta kebutuhan spesifik masing-masing individu.

Selanjutnya, mereka yang terjaring menjalani masa rehabilitasi di rumah singgah milik pemerintah kota. Di tempat ini, para gepeng mendapatkan pembinaan lanjutan yang mencakup kebutuhan dasar hingga pendampingan psikososial. Bagi gepeng yang berasal dari luar daerah, dilakukan proses pemulangan ke daerah asal sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi yang masih memiliki potensi untuk mandiri di Kota Bandung, diberikan pelatihan keterampilan seperti barista, pangkas rambut, dan tata rias sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang lebih layak.

Namun, meskipun proses kolaboratif ini telah berjalan, tingkat keberhasilannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan data real-time yang akurat dan terintegrasi, yang menyebabkan lemahnya perencanaan dan tindak lanjut program. Selain itu, terdapat fenomena berulang di mana sebagian gepeng yang telah direhabilitasi justru kembali ke jalan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan belum sepenuhnya mampu mengubah pola hidup atau kondisi sosial yang mendorong mereka untuk kembali ke praktik lama. Dengan demikian, meskipun kolaborasi antarlembaga telah menunjukkan struktur dan niat baik yang jelas, masih dibutuhkan penguatan dari sisi sistem pendataan, monitoring pascarehabilitasi, serta dukungan lanjutan yang lebih berkelanjutan agar tujuan jangka panjang dari penanganan gepeng ini dapat tercapai secara efektif.

Tabel 3.2 Proses Kolaboratif dalam Pembinaan Gepeng

Tahap Proses	Bentuk Kegiatan	Pelaksana
Penjangkauan	Operasi gabungan	Satpol PP & Dinsos
Asesmen	Wawancara & Klasifikasi	Dinas Sosial
Rehabilitasi	Konseling, pelatihan	Rumah Singgah DINSOS
Pemulangan	Koordinasi antar daerah	Dinsos
Pemantauan	Evaluasi pasca - rehabilitasi	Belum optimal

Sumber: Hasil Penelitian Penulis 2025

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam implementasi kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandung, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program. Salah satu aspek penting adalah adanya dasar hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi landasan legal bagi kerja sama antar lembaga. Dasar hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menetapkan tanggung jawab dan mekanisme koordinasi yang harus dijalankan.

Selain itu, komitmen dari pimpinan masing-masing instansi menjadi motor penggerak utama dalam mendorong sinergi program. Dukungan dari level atas memungkinkan tersedianya berbagai fasilitas pendukung, termasuk rumah singgah sebagai tempat rehabilitasi sementara, serta program pelatihan keterampilan bagi gepeng yang ingin beralih profesi. Partisipasi awal dari masyarakat juga turut menjadi faktor pendorong, terutama melalui peran serta warga dalam melaporkan keberadaan gepeng kepada pihak berwenang, yang menunjukkan adanya kesadaran sosial terhadap permasalahan ini.

Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi juga menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya koordinasi lintas lembaga. Meskipun kolaborasi telah dimulai, komunikasi dan pembagian peran belum berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia pun masih terbatas, baik dari segi kapasitas tempat penampungan maupun sumber daya untuk pembinaan lanjutan.

Di sisi lain, persoalan data juga menjadi tantangan tersendiri. Data mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk gepeng, belum terintegrasi antar instansi, sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, budaya masyarakat yang masih memberikan uang secara langsung kepada gepeng di jalan turut memperburuk situasi, karena mendorong keberlangsungan aktivitas mengemis. Lebih jauh lagi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) gabungan yang bersifat menyeluruh antara Dinas Sosial dan Satpol PP menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pembagian tugas, alur kerja, dan prosedur penanganan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya kolaboratif telah dimulai, masih diperlukan penguatan dalam hal regulasi teknis dan koordinasi operasional agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Aspek	Pendukung	Penghambat
Regulasi	Perda dan SOP	Tidak spesifik terhadap kolaborasi
SDM	Ada kader social	Belum terlatih khusus kolaboratif

Fasilitas	Rumah Singgah tersedia	Kapasitas terbatas
Masyarakat	Ada pelaporan	Masih memberi uang kepada gepeng

Sumber: Hasil penelitian penulis 2025

3.6 Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng), sejumlah upaya strategis perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah integrasi data antara kedua instansi. Dengan membangun sistem pendataan yang terpadu dan berbasis teknologi, informasi mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dikelola secara lebih akurat dan real-time. Hal ini akan mempermudah proses identifikasi, perencanaan intervensi, hingga evaluasi hasil rehabilitasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek krusial. Diperlukan pelatihan kolaboratif lintas sektor guna menumbuhkan semangat kerja sama antarlembaga. Melalui kegiatan pelatihan ini, aparatur dari Dinas Sosial dan Satpol PP dapat memahami peran masing-masing serta memperkuat koordinasi di lapangan.

Di sisi masyarakat, diperlukan strategi sosialisasi kebijakan yang efektif. Edukasi publik harus terus digencarkan agar masyarakat tidak lagi memberikan uang secara langsung kepada gepeng. Perubahan pola pikir ini penting untuk memutus siklus ketergantungan terhadap aktivitas mengemis dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi solusi yang menjanjikan. Pengembangan aplikasi pelaporan dan pemetaan lokasi gepeng akan mempermudah pemantauan oleh petugas, mempercepat penanganan di lapangan, serta meningkatkan akurasi data. Teknologi ini juga dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait.

Terakhir, diperlukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan terpadu. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini bertujuan untuk melacak efektivitas proses rehabilitasi, menilai hasil yang dicapai, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Dengan adanya monev yang terstruktur, kolaborasi antara instansi dapat terus disesuaikan dan dikembangkan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang di Kota Bandung.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kolaborasi dan menjawab tantangan yang selama ini menghambat keberhasilan program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandung dalam pembinaan gelandangan dan pengemis berjalan dalam bentuk kegiatan penertiban bersama, rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi teknis, keterbatasan data terintegrasi, dan belum optimalnya sarana pendukung.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian F. Ayu Hardiyanti (2023) yang menemukan bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP di Kota Medan juga berjalan cukup baik, tetapi dihambat oleh lemahnya koordinasi dan terbatasnya sarana prasarana (Hardiyanti, 2023). Sama halnya dengan temuan tersebut, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi lintas sektor dan pembagian peran yang jelas antarinstansi (Hardiyanti, 2023). Berbeda dengan penelitian Syahna Leidia Darma (2023) yang hanya menyoroti aspek penertiban oleh Satpol PP di Kabupaten Nganjuk, penelitian ini menitikberatkan pada dimensi kolaborasi yang melibatkan proses penjangkauan, pembinaan, dan

pemulangan (Darma, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih menekankan pendekatan integratif dan humanis dalam penanganan PMKS.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Yuyun Mulyati, M. Ridwan Caesar, dan Ellia Purnama yang menekankan pentingnya strategi manajemen dalam penanggulangan PMKS di Kota Bandung, khususnya dalam aspek pemberdayaan sosial (Mulyati et al., 2023). Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan menyoroti sinergi antarinstansi, bukan hanya strategi internal Dinas Sosial. Sementara itu, temuan penelitian ini berbeda dengan hasil riset oleh Susi, Anwar Hidayat, dan Muhammad Abas yang menitikberatkan pada implementasi hukum oleh Satpol PP dalam menegakkan ketertiban sosial di Kabupaten Karawang (Susi et al., 2023). Penelitian ini menolak pendekatan yang hanya berfokus pada aspek represif, dan sebaliknya menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan rehabilitatif sebagai solusi jangka panjang.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan masalah gelandangan dan pengemis memerlukan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, bukan sekadar tindakan penertiban lapangan. Kolaborasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas, dukungan regulasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembinaan PMKS di kawasan perkotaan seperti Kota Bandung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandung dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) telah terjalin dalam berbagai tahapan strategis. Kerja sama ini mencakup proses penertiban di lapangan, penjangkauan terhadap individu yang terjaring, rehabilitasi sosial di rumah singgah, hingga pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk operasi gabungan, asesmen awal untuk menentukan kebutuhan masing-masing individu, serta pemulangan bagi gepeng yang berasal dari luar wilayah Kota Bandung.

Dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini mengacu pada prinsip-prinsip *Collaborative Governance*, yang menekankan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, pentingnya komunikasi dan koordinasi, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan sosial berupa penurunan angka gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan. Meski demikian, implementasi prinsip ini belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek kepemimpinan fasilitatif dan integrasi kelembagaan yang masih membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh sejumlah faktor penting, seperti adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, komitmen awal dari pimpinan kedua lembaga, serta ketersediaan fasilitas seperti rumah singgah dan program pelatihan keterampilan. Namun, kolaborasi ini juga menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi teknis antara instansi masih sering tidak sinkron, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menghambat kelancaran operasional, dan sistem pendataan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terintegrasi secara menyeluruh antarinstansi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sejumlah upaya telah dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan lintas sektor, perbaikan komunikasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pendataan PMKS secara real-time, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang

secara langsung kepada gelandangan dan pengemis, demi mengurangi ketergantungan dan memutus siklus aktivitas mengemis.

Dengan demikian, kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pembinaan gelandangan dan pengemis masih memiliki ruang besar untuk diperkuat. Penguatan ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. Tujuannya bukan hanya untuk menanggulangi gejala sosial yang tampak di permukaan, tetapi juga untuk menyentuh akar permasalahan secara lebih mendalam, sehingga solusi yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya yaitu keterbatasan akses informasi, waktu penelitian yang terbatas, cakupan wilayah penelitian yang terfokus, jumlah informan yang terbatas, dan keterbatasan pengamatan lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan studi lanjutan dalam ruang lingkup kebijakan sosial dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun arah penelitian masa depan yang dapat dikembangkan antara lain studi evaluative jangka panjang, integrasi teknologi dalam pendataan dan pemantauan, perbandingan antar daerah, partisipasi Masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Sekain itu penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama, diantaranya kontribusi teoritis, kontribusi praktis, dan kontribusi kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan baik dari kantor Satpol PP Kota Bandung, maupun Kantor Dinsos Kota Bandung yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fitzpatrick, S., Watts, B., & Bramley, G. (2022). The limits of homelessness prevention: Understanding policy failure. *Housing Studies*, 37(2), 258–275
<https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1883269>.

Bretherton, J., & Pleace, N. (2019). Is Housing First the answer? The evidence from Europe. *European Journal of Homelessness*, 13(1), 13–26
<https://www.feantsa.org/download/ejh1-20191347482905749521056.pdf>

Crossley, S. (2021). Punitive social policy and the criminalisation of poverty. *Critical Social Policy*, 41(2), 169–189. <https://doi.org/10.1177/0261018320961532>

Bandung, open data kota. (2025). *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung*. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-penyandang>

Fadri, Z. (2019). upaya penanggulangan Gelandangandan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta., *Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, 5.

Garmana, D. H. (2020). Konsep dan Aktualisasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Regional Public Administration*, 5(1), 1–10.

Hasanah, N., Irsan, L. M., Musyawarah, R., Ati, A., & Aldiansyah, S. (2024). Analisis Sebaran Spasial Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 9(3), 195–203.

- Hasibuan, P. Y., & Pane, S. B. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Tuna. *Wahana Inovasi*, 8(2), 206–212. <https://doi.org/10.23887/pips.v8i2.4109>
- ngalaman Hidup Gelandangan dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan menjadi Gelandangan dan Pengemis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4956–4965.
- Marhadila, F., Putra Firdaus, F., Dewi, I., Kadilla, R., Apriliani, P. F., Khoiriawati, N., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Islam, B., & Tulungagung, A. R. (2024). Optimalisasi Pentingnya Konsep *Good Governance* dalam Sektor Publik dan Privat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 811–823.
- Misrah, M., & Tamrin, M. (2023). Analisis Kolaborasi Pemerintahan Desa terhadap Komitmen Organisasi Pada Masyarakat Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Terapan*, 1(2), 106–114. <https://doi.org/10.35914/jmet.v1i2.64>
- Mulyati, Y., Ridwan Caesar, M., Purnama, E., Studi, P., & Negara, A. (2022). Res Publica: Journal of Social Policy Issues Article Information Abstract. *Res Publica*, 1(1), 49–60.
- Mutaqin, Z. (2018). Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi di Dinas Sosial Kota Serang Banten. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 10–27.
- Muthi Janatun, R. R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung. *Jurna Ilmu sosial dan Politik*, 109 - 119.
- Naswa. (2022). *Pemaparan Teori Sistem Dan Konsep Serta Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Masyarakat*. [http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5eu3d%0Afile:///C:/Users/Administrator/Downloads/NACSWA PEMAPARAN TEORI SISTEM DAN KONSEP PEMERINTAHAN SERTA TATA KELOLA DI RUANG LINGKUP MASYARAKAT.pdf](http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5eu3d%0Afile:///C:/Users/Administrator/Downloads/NACSWA%20PEMAPARAN%20TEORI%20SISTEM%20DAN%20KONSEP%20PEMERINTAHAN%20SERTA%20TATA%20KELOLA%20DI%20RUANG%20LINGKUP%20MASYARAKAT.pdf)
- Paliama, S. C., Prof, A., Karniawati, N., Ip, S., & Si, M. (n.d.). *Ukur Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung*.
- Pemerintah, P. (1980). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. *Peraturan Pemerintah*, 1–13. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>
- Rahmatullah, R., Djafar, M., & Insani, N. (2024). *Memutus Rantai Kemiskinan : Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis*. 8(2), 92–98.
- Ramlan Surbakti. (1999). Ramlan Surbakti 1999. *Ramlan Surbakti*, 22–69.
- Sarwono, sarlito wirawan. (2005). *masalah - masalah kemasyarakatan di indonesia*. 49.
- Sinaga, S. P., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2021). Implementasi Konsep Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Kecamatan Di Kota Pematangsiantar. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(1), 48–56. <https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.33>
- Susi, Anwar Hidayat, & Muhamad Abas. (2024). Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 317–327. <https://doi.org/10.31933/av1d1q74>
- Sysadmin. (n.d.). *Kegiatan Launching Penanganan Terpadu PMKS Jalanan*.

<https://www.bandung.go.id/news/read/1836/kegiatan-launching-penanganan-terpadu-pmks-jalanan>

Nadiya Wanti Angraini, D. M. (2022). *Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 34-38.

Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan ketertiban Umum(Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis). *Jurnal Tata Pamong*, 98.

Yyun Mulyati, M. R. (2022). Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan . *journal of policy issues*, 49-60.

